



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika

Hari: Rabu

Tanggal: 27 Juli 2016

Halaman: 21

'Sigrak', Antisipasi Tindak Kekerasan

• YULIANINGSIH

Belakangan bermunculan kasus kekerasan berupa penelantaran anak.

YOGYAKARTA — Kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayah Kota Yogyakarta dinilai masih tergolong tinggi. Untuk menekan tindak kekerasan ini, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk satuan tugas (satgas) khusus.

Satgas tersebut dinamakan "Sigrak" (Siap Gerak Atasi Kekerasan). Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat mengatakan, satgas tersebut beranggotakan elemen masyarakat di tingkat kelurahan. Seperti tokoh masyarakat, anggota PKK, karang taruna, dan juga tokoh agama. Keberadaan satgas ini diharapkan dapat mendeteksi dini potensi tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga atau pun lingkungan sekitar, termasuk juga terhadap laki-laki. "Se-

lama ini sudah ada lembaga mitra keluarga di kecamatan, sehingga satgas ini bisa bekerja sama," kata dia di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (26/7).

Pembentukan Satgas Sigrak akan dikukuhkan pada peringatan Hari Anak Nasional di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (28/7). Setiap kelurahan nantinya akan memiliki satgas tersebut. Menurut Anggota Satgas Sigrak, Ferian Fembriansyah, yang juga anggota Forum Anak Yogyakarta, personel satgas anti-kekerasan itu sudah dilatih kemampuan untuk dapat memberikan konseling atau pendampingan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan. "Di setiap kelurahan nanti akan dikampanyekan adanya satgas ini. Ibu-ibu sudah memiliki tempat 'curhat' jika ada masalah kekerasan di rumah tangganya," ujar dia.

Satgas Sigrak dibentuk lantaran kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih terjadi. Pada 2011 di wilayah Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 142 kasus, kemudian naik menjadi 265 kasus, dan 691 kasus pada 2013. Sementara pada 2014 terdapat 642 kasus. Tahun lalu diketahui terjadi 629 kasus kekerasan. Dari jumlah kasus pada 2015 itu, sebanyak 459 di antaranya sudah diselesaikan, 164 masih dalam penanganan, dan

tiga kasus dilimpahkan ke pengadilan. Pada 2015, kasus kekerasan yang dialami anak berusia kurang dari 17 tahun sebanyak 86 kasus dan sisanya dialami anak berusia hingga 18 tahun. "Dari data memang agak menurun, namun masih tergolong tinggi, dan ini seperti 'gunung es' karena kita yakin yang tidak dilaporkan banyak," kata Octo.

Mengenai jenis kekerasan yang dialami anak-anak di Kota Yogyakarta, Octo menyebut, terlihat ada pergeseran. Semula yang terjadi bentuknya berupa kekerasan fisik dan psikis. Sejak tahun lalu, kata dia, muncul tindak kekerasan berupa penelantaran. Menurut dia, terjadinya penelantaran ini bisa dipengaruhi sejumlah faktor. Antara lain, ia mengatakan, karena lunturnya nilai-nilai kekeluargaan. Termasuk juga orang tua yang tidak siap membesarkan dan merawat anak karena terpaksa menikah setelah mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.

Menurut Octo, tingkat penelantaran yang dilakukan orang tua cukup beragam. Mulai dari tidak memberikan perhatian kepada anak, hingga penelantaran dengan kategori yang cukup berat, seperti meninggalkan anak. Ia menekankan, orang tua yang

menelantarkan anaknya ini bisa diproses secara hukum dengan pasal pidana. Namun, kata dia, upaya tersebut sering kali terganjal persoalan lain, yaitu harus didasarkan pada delik aduan.

Ke depan, keberadaan Satgas Sigrak diharapkan dapat juga memudahkan korban kekerasan untuk melapor dan berkonsultasi. Kepala Seksi Peningkatan Pemberdayaan Perempuan KPMP Kota Yogyakarta Hendro Basuki pun mengatakan, dengan begitu, tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan bisa jadi akan lebih banyak diketahui. "Yang tadinya tidak lapor, kemudian akan banyak yang lapor," ujar dia.

Selain Satgas Sigrak, upaya lain untuk mencegah dan menekan tindak kekerasan terhadap anak ini dapat dilakukan melalui pembentukan kampung ramah anak (KRA). Hingga akhir tahun lalu sudah terbentuk 156 KRA di Kota Yogyakarta, dan tahun ini ditargetkan ada tambahan 32 kampung. Namun, Octo mengatakan, keberadaan kampung ini harus didasarkan pada inisiatif dan komitmen dari masyarakat. "Tanpa itu, maka kampung ramah anak tidak mampu berperan maksimal untuk mendorong pemenuhan hak anak," kata dia.

■ antara edirfan litrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005